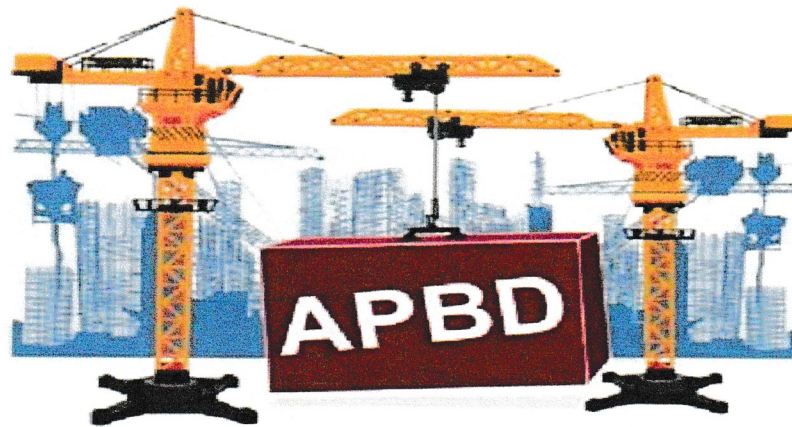


FITRA PREDIKSI SILPA RP 3,4T



<http://kabar24.bisnis.com/>

SEMENTARA itu, Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau Rahmad Rahim memprediksikan berdasarkan analisisnya SiLPA Riau tahun 2016 hanya Rp1,6 triliun. Anggaran ini merupakan Bantuan keuangan yang diberikan Pemprov ke Kabupaten/Kota di Riau.

“Rp1,6 triliun itu merupakan Bankeu yang dibantu ke Kabupaten/Kota, ada program Pemprov yang tidak bisa dijalankan dan diserahkan ke Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan, “Ujar Rahmad Rahim kepada Tribun.

Angka tersebut menurut Rahmad, memang diakuinya baru prediksi, angka ini berbeda jauh dari prediksi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Dimana memprediksi SiLPA Riau 2016 mencapai Rp3,4 triliun. “Tidak mungkin mencapai segitu, itu hasil kajian yang kami lakukan, “Ujar Rahmad Rahim.

Sebagaimana diketahui Pemprov Riau mengalokasikan anggaran untuk Bankeu Kabupaten/Kota dengan anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Bankeu ini terbagi dalam dua bentuk dimana ada bantuan secara umum ada yang bersifat khusus.

“Ada umum dan khusus, ada program Pemprov untuk daerah pesisir itu bankeu berbentuk khusus, “jelas Rahmad.

Pemprov sendiri sudah menyerahkan KUA PPAS APBD 2017 ke Dewan dengan nilai Rp1,6 triliun maka dapat dipastikan APBD Riau 2017 juga bisa mencapai diatas Rp10 triliun lebih.

Artinya APBD Riau 2017 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, meskipun terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil sektor Migas dan Pajak.

Ketua Fitra Riau, Usman mempersilahkan Bappeda maupun TAPD membuat analisis tentang serapan anggaran dan angka SiLPA 2016. Namun dirinya melihat angka SiLPA tersebut berdasarkan prediksi Fitra hampir sama dengan tahun 2015 lalu.

“Kita kemarin menghitungnya berdasarkan program dan kegiatan yang sudah di lelang dan belanja tidak langsung dalam APBD murni 2016, jadi kalau dilihat dari sana serapan finalnya segitu,” Kata Usman.

Prediksi Fitra terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2016, hanya mampu terealisasi 67 persen atau sebesar Rp 6,94 triliun sampai akhir tahun 2016.

Angka tersebut dihitung dari total belanja daerah sebesar Rp10,36 triliun setelah perubahan APBD 2016 dengan potensi SiLPA mencapai Rp3,41 triliun. Hal itu, tentu berdampak buruk dan menyandera terhadap kepentingan masyarakat Riau.

APBD 2016 sebelumnya direncanakan sebesar Rp10,9 triliun turun menjadi Rp10,3 triliun setelah perubahan atau turun sebesar 6 persen. Berdasarkan potensi realisasi yang hanya mampu terserap sebesar 67 persen maka diprediksi terdapat SiLPA Rp3,41 triliun di tahun 2016, dapat dipastikan SiLPA tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, bahkan lebih buruk dari tahun 2015 terdapat SiLPA sebesar Rp3,1 triliun dan tahun 2014 dengan SiLPA sebesar Rp3,9 triliun setelah audit.

“Artinya selama tiga tahun (2014, 2015, 2016) uang Daerah mengendap sebesar Rp10,5 triliun yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat Riau secara luas,” Kata Usman.

Menurut Usman, prediksi tersebut dihitung berdasarkan realisasi kehiatan yang sedang dilakukan Pemerintahan Provinsi Riau melalui Satuan Kerja/SKPD sesuai kegiatan yang telah dilelang, khususnya belanja modal dan barang jasa pada komponen belanja langsung.

Melalui LPSE Provinsi Riau kegiatan yang sudah dilelang sampai periode 30 September 2016, yaitu sebesar Rp1,55 triliun atau 31,2 persen dari total belanja langsung sebesar Rp4,96 triliun yang dianggarkan setelah perubahan APBD 2016, terjadi penurunan pada belanja sebesar Rp5,58 triliun turun sebesar Rp615,4 miliar.

“Atas dasar itu, dapat diperkirakan sampai akhir tahun 2016 potensi penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar 50 persen atau sebesar Rp2,48 triliun dari total belanja langsung sebesar Rp4,96 triliun,” ujar Usman.

Angka prediksi 50 persen tersebut terdiri 31,2 persen atau sebesar Rp1,55 triliun telah dilelang yang dianggap akan terealisasi sampai akhir desember 2016. Sedangkan 18,8 persen atau sebesar Rp932,4 miliar diprediksikan untuk belanja kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah pada periode Oktober sampai 31 Desember 2016, selain itu juga terdapat belanja kegiatan tidak melalui proses lelang.

Penurunan belanja langsung tersebut, salah satunya terdapat pada item belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, sebelumnya bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp1,58 triliun turun menjadi Rp1,41 triliun, turun sebesar Rp166,8 miliar atau 10,6 Persen. Selain itu, bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp500 juta per desa sebagaimana dianggarkan pada APBD 2015 dihilangkan pada APBD tahun 2016 ini.

Selain itu, perhitungan ini juga berasal dari potensi penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja yang

tidak terduga yang diprediksikan akan terserap hanya 83 persen yaitu Rp4,47 triliun dari total belanja tidak langsung sebesar Rp5,39 triliun setelah perubahan APBD tahun 2016, prediksi ini mengacu pada realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 setelah hasil audit.

Jadi dari total belanja daerah Provinsi Riau yang dianggarkan sebesar Rp10,36 triliun setelah perubahan, maka dapat diprediksi terserap sampai akhir tahun hanya 67 persen terdiri dari belanja langsung sebesar 50 persen atau Rp2,48 triliun dan belanja tidak langsung sebesar 83 persen atau sebesar Rp4,48 triliun. Dari prediksi tersebut dapat dipastikan membengkaknya SiLPA pada tahun 2016 sebesar Rp3,41 triliun.

“Prediksi ini mendekati realisasi serapan APBD tahun 2015 yaitu sebesar 68 persen setelah audit, ini menunjukkan pemerintah tidak becus mengelola uang rakyat dan mengabaikan kehidupan masyarakat yang layak seperti terbebas dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi. Apalagi dengan diturunkan anggaran penanganan karhutla pada perubahan APBD 2016” Jelas Usman.

Sumber:

1. <http://www.riauonline.co.id/2016/10/14/fitra-selama-tiga-tahun-uang-daerah-mengendap-sebesar-Rp10,5-triliun;>
2. Tribun Pekanbaru, Fitra Prediksi SiLPA Rp3,4 T, 09 November 2016.

Catatan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *Juncto* Pasal 1 angka 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah **Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.**

Sedangkan menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, **SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** adalah **selisih lebih antara realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan**

Meskipun antara PP No. 58 Tahun 2005 *Juncto* Permendagri No. 21 Tahun 2011 dengan PP No. 71 Tahun 2010 berbeda definisi dari SiLPA, namun keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu selisih antara penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penerimaan daerah yang berarti uang yang masuk ke kas daerah¹ (berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan) dan **pengeluaran daerah** yang berarti uang yang keluar dari kas daerah² (berasal dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan).

Dalam hal ini apabila suatu pemerintah daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota Per 31 Desember tahun berjalan mempunyai **SiLPA tahun anggaran berjalan/periode pelaporan**, maka SiLPA tersebut untuk tahun anggaran berikutnya akan dimasukkan kembali sebagai **penerimaan pembiayaan APBD tahun berjalan sebagai Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya..**

SiLPA tahun anggaran berjalan pada pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu³:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi target/anggaran;
2. Realisasi dana perimbangan melebihi target/anggaran;
3. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah melebihi target/anggaran;
4. Realisasi pembiayaan melebihi target/anggaran;
5. Penghematan belanja daerah;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga (diluar pembayaran pajak pusat, IWP, Taperum, Askes, dan yang lain yang bersifat kas non anggaran) sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan;
7. Sisa dana kegiatan lanjutan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

¹ PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka (24) dan Penjelasan

² Ibid., Pasal 1 angka (25) dan Penjelasan

³ Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 62



FITRA Prediksi Silpa Rp 3,4 T

SEMENTARA itu, Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau Rahmad Rahim memprediksikan berdasarkan analisa-nya Silpa Riau tahun 2016 hanya Rp 1,6 triliun. Anggaran ini merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan Pemprov ke Kabupaten/Kota di Riau.

"Rp 1,6 triliun itu merupakan Bankeu yang dibantu ke Kabupaten/Kota, ada program Pemprov yang tidak bisa dijalankan dan diserahkan ke Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan," ujar Rahmad Rahim kepada Tribun.

Angka tersebut menurut Rahmad, memang diakui-nya baru prediksi, angka ini berbeda jauh dari prediksi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Dimana memprediksi Silpa Riau 2016 mencapai Rp 3,4 triliun. "Tidak mungkin mencapai segitu, itu hasil

■ Bersambung ke Hal 15



FITRA Prediksi

Sambungan Hal. 9

kajian yang kami lakukan," ujar Rahmad Rahim.

Sebagaimana diketahui Pemprov Riau mengalokasikan anggaran untuk Bankeu Kabupaten/Kota dengan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun. Bankeu ini terbagi dalam dua bentuk dimana ada bantuan secara umum ada yang bersifat khusus.

"Ada umum dan khusus, ada program Pemprov untuk daerah pesisir itu bankeu berbentuk khusus," jelas Rahmad.

Pemprov sendiri sudah menyerahkan KUA PPAS APBD 2017 ke Dewan dengan nilai Rp 9,8 Triliun, dengan angka Silpa mencapai Rp 1,6 triliun maka dapat dipastikan APBD Riau 2017 juga bisa mencapai diatas Rp 10 triliun lebih.

Artinya APBD Riau 2017 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, meskipun terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil sektor Migas dan Pajak.

Ketua Fitra Riau, Usman mempersilahkan Bappeda maupun TAPD membuat analisis tentang serapan anggaran dan angka Silpa 2016. Namun dirinya melihat angka Silpa tersebut berdasarkan prediksi Fitra hampir sama dengan tahun 2015 lalu.

"Kita kemaren menghitungnya berdasarkan program dan kegiatan yg sudah di lelang dan belanja tidak langsung dalam APBD murni 2016, jadi kalau dilihat dari sana serapan finalnya segitu," kata Usman.

Prediksi Fitra terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2016, hanya mampu terealisasi 67 persen atau sebesar Rp 6,94 triliun sampai akhir tahun 2016.

Angka tersebut dihitung dari total belanja daerah sebesar Rp10,36 triliun setelah perubahan APBD 2016 dengan potensi Silpa mencapai Rp3,41 triliun. Hal itu, tentu berdampak buruk dan menyandera terhadap kepentingan masyarakat Riau.

APBD 2016 sebelumnya direncanakan sebesar 10,9 triliun turun menjadi Rp10,3 triliun setelah perubahan atau turun

sebesar 6 persen. Berdasarkan potensi realisasi yang hanya mampu terserap sebesar 67 persen maka diprediksi terdapat Silpa Rp3,41 triliun tahun 2016, dapat dipastikan silpa tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, bahkan lebih buruk dari tahun 2015 terdapat Silpa sebesar Rp3,1 triliun dan tahun 2014 dengan silpa sebesar Rp3,9 triliun setelah audit.

"Artinya selama tiga tahun (2014, 2015, 2016) uang Daerah mengendap sebesar Rp10,5 triliun yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat Riau secara luas," kata Usman.

Menurut Usman, prediksi tersebut dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui Satuan Kerja/SKPD sesuai kegiatan yang telah dilelang, khususnya belanja modal dan barang jasa pada komponen belanja langsung.

Melalui LPSE Provinsi Riau kegiatan yang telah dilelang sampai priode 30 September 2016, yaitu sebesar Rp1,55 triliun atau 31,2 persen dari total belanja langsung sebesar Rp4,96 triliun yang dianggarkan setelah perubahan APBD 2016, terjadi penurunan pada belanja langsung yang sebelumnya sebesar Rp5,58 triliun turun sebesar Rp615,4 miliar.

"Atas dasar itu, dapat diperkirakan sampai akhir tahun 2016 potensi penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar 50 persen, atau sebesar Rp 2,48 triliun dari total belanja langsung sebesar Rp 4,96 triliun," ujar Usman.

Angka prediksi 50 persen tersebut, terdiri 31,2 persen atau sebesar Rp1,55 triliun telah di lelang yang dianggap akan terealisasi sampai akhir desember 2016. Sedangkan 18,8 persen atau sebesar Rp932,4 miliar diprediksikan untuk belanja kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah pada priode Oktober sampai 31 Desember 2016, selain itu juga terdapat belanja kegiatan yang tidak melalui pro-

ses lelang.

Penurunan belanja langsung tersebut, salah satunya terdapat pada item belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, sebelumnya bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp1,58 triliun turun menjadi Rp1,41 triliun, turun sebesar Rp166,8 miliar atau 10,6 persen.

Selain itu, bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp500 juta per desa sebagaimana dianggarkan pada APBD 2015 di hilangkan pada APBD tahun 2016 ini.

Selain itu, perhitungan ini juga berasal dari potensi penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang di prediksi akan terserap hanya 83 persen yaitu Rp4,47 triliun dari total belanja tidak langsung sebesar Rp5,39 triliun setelah perubahan APBD tahun 2016, prediksi ini mengacu pada realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 setelah hasil audit.

Jadi dari total belanja daerah Provinsi Riau yang dianggarkan sebesar Rp 10,36 triliun setelah perubahan, maka dapat diprediksi terserap sampai akhir tahun hanya 67 persen, terdiri dari belanja langsung sebesar 50 persen atau Rp 2,48 triliun dan belanja tidak langsung sebesar 83 persen atau sebesar Rp 4,48 triliun.

Dari prediksi tersebut dapat dipastikan membengkaknya Silpa tahun 2016 sebesar Rp 3,41 triliun.

"Prediksi ini mendekati realisasi serapan APBD tahun 2015 yaitu sebesar 68 persen setelah audit, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak becus mengelola uang rakyat dan mengabaikan kehidupan masyarakat yang layak seperti terbebas dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi. Apalagi dengan diturunkan anggaran penanganan karhutla pada perubahan APBD 2016," jelas Usman. (uha)